

THE STRATEGY OF HUMAN ECONOMIC DEVELOPMENT: THE EFFECT ON REDUCING MIGRANT WORKER OF INFORMAL SECTOR

Cakti Indra Gunawan dan Reiza
Universitas Tribhuwana Tunggaladewi dan Universitas Brawijaya

Abstract

One of the development strategy for reducing poverty and equitable welfare society, Indonesian government has proposed to increase the national income of the shipping sector to foreign migrants. Indonesia is known as a source of migrant workers sending the second largest after the Philippines in the ASEAN level. Currently the largest non-tax revenue is from sending migrant workers. In the era of Jokowi leadership, a reduction in the informal sector workers and give priority to formal sector workers. The purpose of this study is to find out why Indonesia reduce the informal sector workforce, to compare Human Resources (HR) planning strategy in migrants in the Jokowi government sector and previous government and to know precisely why informal sector provides the highest foreign exchange from migrant workers sector. This research method employes a descriptive qualitative technique using comparative literature.

Keywords : Strategic HR planning, labor migrants.

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA: DAMPAK PENGURANGAN TENAGA KERJA MIGRAN SEKTOR INFORMAL

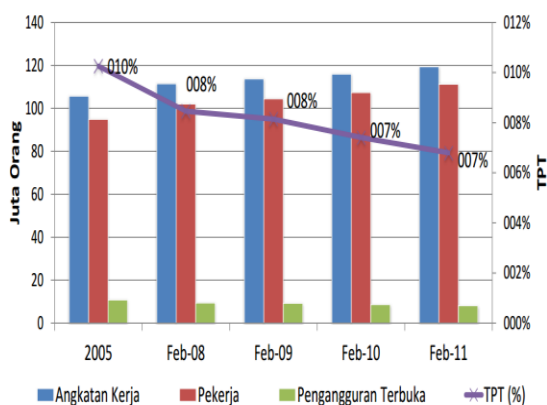
Abstrak

Salah satu strategi pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia telah merencanakan peningkatan pendapatan nasional dari sektor pengiriman migran ke luar negeri. Indonesia dikenal sebagai sumber pengiriman tenaga kerja migran terbesar ke-2 setelah Filipina di tingkat Asean. Saat ini pemasukan terbesar non-pajak adalah dari pengiriman tenaga kerja migran. Pada era kepemimpinan Jokowi, pengurangan pengiriman tenaga kerja sektor informal dan mengutamakan tenaga kerja sektor formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Indonesia mengurangi tenaga kerja sektor informal, untuk membandingkan strategi perencanaan SDM di sektor migran di pemerintahan Jokowi dan pemerintahan sebelumnya serta mengetahui mengapa sektor informal justru memberikan devisa negara yang paling tinggi dari sektor tenaga kerja migran. Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan komparasi literatur.

Kata Kunci: Strategi perencanaan SDM, tenaga kerja migran

Latar Belakang

Kepadatan penduduk Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara, dan peringkat keempat di dunia setelah Republik Rakyat China, India, dan Amerika Serikat (Sugiharyanto, 2007:22). Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 241.973.879 jiwa dengan kepadatan 127 jiwa/km² (BPS, 2010). Total populasi penduduk Indonesia memiliki tren yang cenderung meningkat setiap tahun. Selalu meningkatnya jumlah tersebut diperlukan adanya penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2009, jumlah lapangan kerja di Indonesia hampir seluruh sektor mengalami kenaikan. Sepertihalnya kenaikan lapangan pekerjaan sektor perdagangan mengalami kenaikan 1.160.000 orang. Kenaikan hampir seluruh sektor tersebut dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2009 pula.



Gambar 1 Data Pengangguran 2008

Sumber: BNP2TKI, 2009

Ternyata data menunjukkan bahwa pengangguran terbuka menurun sebesar 170.000 orang. Hal ini mengasumsikan bahwa dengan adanya kenaikan lapangan pekerjaan mampu menyerap tenaga kerja sehingga menurunkan angka pengangguran. Namun upah yang didapat

dapa sektor pertanian dan kemasyarakatan cenderung rendah. Sehingga menyebabkan para pekerja bahkan pengangguran Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Gaji yang diperoleh pekerja di luar negeri atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Gaji pekerja sektor informal TKI mencapai 1.600.000 perbulan, sedangkan sektor formal 4.000.000-5.000.000 perbulan (Dianningtyas, 2011). Gaji yang cukup tinggi serta kebutuhan tingkat pendidikan yang cenderung rendah menyebabkan tingginya angka pengiriman TKI ke luar negeri.

Hampir setiap hari kita melihat tayangan televisi tentang permasalahan TKI di luar negeri. Mulai dari pemulangan kedaerah asal, penyiksaan dan penyandaraan TKI. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan kualitas dari TKI yang dikirim sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. Permasalahan tenaga kerja selalu menjadi agenda utama dalam setiap pergantian pemerintah dan menjadi agenda tetap dalam mengatasi pengangguran setiap tahunnya (Elfindri & Rimilton Riduan, 2008).

Pemaknaan TKI

Tenaga kerja menurut UU 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Agusmidah, 2010:5). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia pada Pasal1 dapat mendefinisikan pengertian dari TKI. Pada ayat ke-1 yang berbunyi calon Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian pada ayat ke-2 tenaga kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tersebut, sangat jelas terlihat bahwa TKI merupakan perkerjaan yang baik dan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Klasifikasi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu tenaga kerja formal, tenaga kerja informal dan tenaga kerja profesional. Pengklasifikasian TKI tersebut sangat diperlukan pada saat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang biasa dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Berdasarkan klasifikasi TKI tersebut, tenaga kerja formal dan tenaga kerja profesional adalah yang memiliki jaminan HAM serta kepastian upah yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tenaga kerja informal. Namun terlepas dari pengklasifikasian tenaga kerja tersebut, seluruh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangatlah berjasa besar bagi peningkatan jumlah devisa negara kita dari tahun ke tahun.

Metode Penelitian

Paper ini berbasis analisis kualitatif, dengan mengambil berbagai sumber literatur baik laporan dari pemerintah maupun dari sumber-sumber ilmiah lainnya. Informasi yang diolah adalah data dari laporan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan data dari Bank Indonesia.

Fungsi Pemerintah sebagai Perangkat Regulasi

Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga negara dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai merupakan tujuan utama dibentuknya pemerintahan. Pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan pada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Haryanto dkk dalam Rosyidah, 2013 : 18).

Pengurangan Pengiriman TKI Sektor Informal

Berdasarkan hasil pelaporan BNP2TKI bahwa proporsi penyaluran TKI yang terbesar adalah ke wilayah Asia dengan proporsi sebesar 58,1 persen dari jumlah pengiriman TKI ke berbagai negara tujuan. Beberapa negara di wilayah Asia yang menjadi tujuan para TKI adalah Malaysia, Thailand, Hongkong dan Singapura. Namun proporsi negara tujuan TKI terbesar adalah Malaysia dimana memiliki proporsi sebesar 78 persen dari jumlah keseluruhan TKI yang dikirimkan ke wilayah Asia. Apabila dinyatakan dalam bentuk tenaga kerja yang dikirimkan ke Malaysia yaitu sebanyak 1,9 juta jiwa. Jumlah tenaga kerja di Malaysia tersebut memiliki proporsi terbesar dibandingkan negara tujuan TKI lainnya seperti Thailand, Hongkong, dan Singapura. Proporsi Thailand, Hongkong dan Singapura masing-masing hanya sebesar 182 ribu, 167 ribu dan 132 ribu TKI.

Tabel 1. Proporsi Pengiriman Tenaga Migran ke Negara Tujuan

Wilayah	Proporsi
Asia	58,10%
Timur Tengah dan Afrika	41%
Eropa dan Australia	0.30%
Amerika	0.60%
Total Pengiriman	100%

Sumber: BNP2TKI, 2010, diolah

Alasan utama TKI ke luar negeri adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, kisah sukses teman-teman mereka membuat mereka bersedia untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja. BNP2TKI mengumumkan TKI adalah perlindungan. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka bisa menjadi pengusaha. Tapi, itu akan tergantung pada bagaimana mereka menggunakan uang kiriman mereka di daerah asal mereka di Indonesia. Keberhasilan TKI dalam kehidupan masa depan mereka akan tergantung pada penempatan, pola hidup, dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Penelitian ini melakukan survei pada penempatan TKI di Kedah, Malaysia untuk mengetahui kehidupan mereka secara rinci (Mafrurah dkk, 2012).

Negara Indonesia merupakan satu dari semua negara di dunia yang meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui transaksi ekspor jasa yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Aprilliana dan Meydianawathi, 2013). Hubungan internasional suatu negara dengan negara lain tidak hanya melalui pertukaran barang dan jasa, namun perpindahan faktor produksi, transfer modal dan beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional juga termasuk ke dalam hubungan tersebut (Krugman, 2003: 192).

Pada 2015 pemerintah mengesahkan kebijakan terhadap penanganan TKI

melalui Kebijakan Rencana Program (KRP) Prioritas dan Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 kepada anggota Komisi IX DPR-RI. Program bidang Kerjasama Luar negeri dan Promosi (KLNP) ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara tujuan penempatan dan meningkatnya calon TKI yang memiliki kompetensi/kualifikasi sesuai dengan permintaan tenaga kerja dari negara tujuan penempatan. Proporsi TKI informal yang lebih besar masih mengalami banyak kendala seperti kekerasan fisik, seksual, serta mental. Hal ini disebabkan ketidakjelasan surat kerja atau prosedur kerja kepada para TKI informal. Berbagai aksi kekerasan serta pelecehan seksual yang terjadi menyebabkan pemerintah mengambil sikap yaitu memberlakukan kebijakan pembatasan tenaga kerja Informal ke luar negeri. Pembatasan tenaga kerja informal beserta kompensasi ke negara-negara tertentu telah diupayakan pemerintah seiring dengan perlakuan baik yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia di negara-negara tertentu. Seiring dengan penetapan kebijakan tersebut, akan dianalisis terkait dengan kontribusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap devisa dan sebaran TKI berdasarkan lokasi sektor usaha.

Langkah BNP2TKI dalam upaya mengurangi unskilled workers & meningkatkan skilled workers untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) antara lain: Pertama, melakukan akreditasi terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) dengan memberikan penilaian kepada BLK tersebut terhadap kualitas dan kesiapan untuk menjadi lembaga-lembaga yang akan melatih calon TKI. Kedua, melakukan pembinaan terhadap BLK. Terhadap BLK yang memiliki akreditasi baik atau memenuhi standar maka dapat melakukan pelatihan langsung. Tapi untuk BLK yang belum memenuhi standar, akan

diberikan kesempatan untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan, yaitu terhadap sarana prasana, instruktur, dan program-program pembelajaran yang harus dipersiapkan. Kalau sudah dilakukan pembinaan maka dalam kurun waktu tertentu (1-2 tahun misalnya) BLK tersebut sudah siap maka akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan terhadap calon TKI.

Ketiga, memastikan adanya standar-standar yang ditetapkan dalam proses pelatihan, seperti standar untuk sarana prasana, instruktur yang diharapkan sudah memiliki sertifikat kompetensi, silabus, ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain. Keempat, memperbaiki kurikulum pelatihan. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 1 tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Pekerjaam Domestik, yang telah merinci kompetensi yang tadinya adalah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) menjadi 7 kompetensi, yaitu Pengurus Rumah Tangga (Housekeeper), Penjaga Bayi (Baby Sitter), Tukang Masak (Family Cook), Pengurus Lansia (Caretaker), Supir Keluarga (Family Driver), Tukang Kebun (Gardener), dan Penjaga Anak (Child Care Worker), untuk itu diperlukan adanya program-program khusus yang disesuaikan dengan 7 jabatan ini. Dari segi instruktur pun harus khusus juga, sesuai dengan program-program yang ditetapkan tersebut.

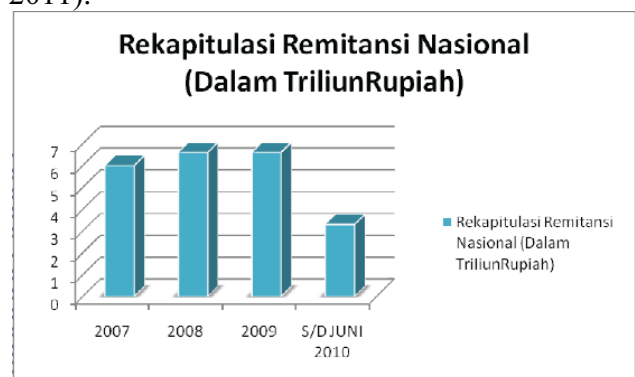
Kelima, lembaga sertifikat kompetensi akan disesuaikan dengan kompetensi yang diminta oleh negara-negara penempatan. Dengan adanya kebijakan nasional untuk mendayagunakan tenaga kerja secara nasional, BNP2TKI melakukan pemetaan terhadap potensi yang ada di dalam negeri terhadap kebutuhan dari negara penempatan. Sehingga akan bisa dihitung kebutuhan masing-masing tenaga profesi, serta dapat

diketahui apakah terdapat kelebihan terhadap masing-masing tenaga profesi tersebut.

Penyumbang Devisa Negara Tertinggi dari *Remittance*

Tenaga kerja Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap remitansi yang mengalir ke Indonesia. Remitansi yang dikirimkan oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki kecenderungan yang meningkat di setiap tahunnya. Remitansi merupakan uang atau barang yang dikirim oleh TKI kepada keluarganya di daerah asal, sementara TKI masih berada di negara tujuan bekerja. Remitansi merupakan sebagian pendapatan yang dikirim untuk keluarga di daerah asal, sedangkan bagi keluarga TKI remitansi tersebut merupakan pendapatan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Menurut Ardana, dkk (2011) dan Suryantara (2010), pendapatan TKI memberikan pengaruh positif terhadap besar remitansi yang dikirim ke daerah asal.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri memberikan kontribusi *remittance* yang cukup besar terhadap Indonesia. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Bank Indonesia bahwa terjadi peningkatan total *remittance* sebesar 5,6 triliun rupiah pada tahun 2008 yang semula hanya mencapai 6 triliun rupiah pada tahun 2007 (Dianningtyas, 2011).



Gambar 2: Remitansi Nasional

Sumber: Bank Indonesia, 2010

Sumbangan rata-rata seorang TKI meningkat setiap tahun. Pada tahun 2008 per TKI menyumbang 1.489 dollar AS dan mencapai puncaknya tahun 2013 sebesar 1.745 dollar AS. Memang sumbangan rata-rata TKI tak seberapa dibandingkan dengan devisa yang dibawa keluar oleh pekerja-pekerja asing di Indonesia yang rata-ratanya tahun 2011 berjumlah 34.850 dollar AS atau 21 kali lebih besar dari pendapatan TKI yang dibawa pulang ke tanah air.

Berdasarkan data pada BNP2TKI sampai dengan akhir tahun 2008 jumlah TKI yang bekerja diluar negeri mencapai angka enam juta orang dengan sebagian besar bekerja disektor informal dan uang yang dikirim (remittance) mencapai seratus tiga puluh ribu triliyun rupiah. Jumlah danayang tidak sedikit ini menjadi sumber devisa bagi negara yang sudah pasti dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa secara umum. Selain itu pengiriman TKI keluar negeri dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran didalam negeri, juga telah membantu pengentasan kemiskinan bagi keluarga TKI didaerah asal melalui pengiriman uang dari TKI.

Perbandingan Strategi Perencanaan SDM Sektor Informal Dua Era Pemerintahan

Setiap kebijakan pemerintahan memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Begitu juga dengan pemerintahan SBY dan pemerintahan presiden saat ini yaitu Jokowi. Permasalahan yang mencuat di Indonesia masih sama diantaranya adalah masalah penanganan TKI. Namun dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pemerintahan Jokowi yang belum genap satu tahun, sehingga belum dapat dipastikan kebijakan apa saja yang akan dikeluarkan selain dibatasinya pengiriman

jumlah TKI sektor informal. Maka berbeda dengan pemerintahan era SBY dalam menangani TKI yang amsa pemerintahannya sudah selesai dan dapat dilihat secara pasti kebijakan-kebijakannya.

Pemerintah membentuk badan tersendiri untuk menangani penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2006. Upaya lainnya adalah membenahi proses administrasi, seleksi, penyiapan atau pelatihan, sampai pada penempatan di luar negeri. Demikian juga dengan penyediaan anggaran, perbaikan mekanisme kerja, pembenahandan penguatan organisasi/kelembagaan (Kemenakertrans dan BNP2TKI), serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun ternyata masih saja banyak ditemui permasalahan yang terjadi terkait penempatan tenaga kerja kita ke luar negeri. Setelah ditelusuri, mayoritas masalah yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) ternyata bersumber ketika TKI masih berada di dalam negeri. Adapun masalah-masalah tersebut ialah rendahnya kualitas sistem pelatihan yang diterapkan PJTKI, pemalsuan dokumen, penipuan sejak rekrutmen, penempatan ilegal, minimnya perlindungan hukum, perjanjian kerja yang tidak sesuai, dan pemerasan (Fatimah, 2014)

Masa pemerintahan SBY menjadi masa yang paling banyak mengeluarkan peraturan mengenai migrasi tenaga kerja Indonesia. Meski jumlah kebijakan migrasi ketenagakerjaan yang yang dikeluarkan pada era pemerintahan SBY tergolong banyak, namun berbagai permasalahan juga hadir dalam tahap implementasi kebijakan. Hal ini ditunjukkan dari tingkat masalah dan kekerasan yang terjadi pada buruh migran Indonesia, khususnya perempuan (Azmy, 2011). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memang berusaha melakukan hal yang sama pada

sistem pemerintahannya, tetapi tampak lebih fokus pada pencitraan semata, bukan substansi persoalan yang menuntut perbaikan sistem kebijakan. Harapan itu rupanya sulit menjadi kenyataan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke depan (Hasibuan, 2011).

Kesimpulan

Negara RI dengan Negara tujuan penempatan dan meningkatnya calon TKI yang memiliki kompetensi/kualifikasi sesuai dengan permintaan tenaga kerja dari negara tujuan penempatan. Proporsi TKI informal yang lebih besar masih mengalami banyak kendala seperti kekerasan fisik, seksual, serta mental. Hal ini disebabkan ketidakjelasan surat kerja atau prosedur kerja kepada para TKI informal. Berbagai aksi kekerasan serta pelecehan seksual yang terjadi menyebabkan pemerintah mengambil sikap yaitu memberlakukan kebijakan pembatasan tenaga kerja informal ke luar negeri. Pembatasan tenaga kerja informal beserta kompensasi ke negara-negara tertentu telah diupayakan pemerintah seiring dengan perlakuan baik yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia di negara-negara tertentu.

Tenaga kerja Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap remitansi yang mengalir ke Indonesia. Remitansi yang dikirimkan oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki kecenderungan yang meningkat di setiap tahunnya. Pada 2005 sebesar Rp.5.722.000.000, kemudian meningkat pada tahun 2006 sebesar Rp.6.000.000.000, pada tahun 2007 meningkat sebesar Rp.6.174.000.000.

Pada masa pemerintahan SBY maupun Jokowi masih didapati permasalahan dalam penanganan TKI. Kedua pemerintahan tersebut memiliki kebijakan masing-masing yang juga terdapat kelebihan dan kekurangan. SBY berfokus pada penempatan dan

perlindungan TKI, sedangkan Jokowi berupaya dalam pengurangan unskilled workers yang juga bertujuan tiada lagi kekerasan yang dialami oleh para TKI di negara tujuan.

Daftar Pustaka

- Agusmidah. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: USU Press.
- Aprilliana, Dewi dan Meydianawathi, LuhGede. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengiriman Remitansi Asal Bali di Amerika Serikat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* ISSN: 2303-0178. E-Jurnal EP Unud, 2 [8] :373-383.
- Ardana, I Putu., Sudibia, I Ketut., Wirathi, I Gusti Ayu Putu. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Pengiriman Remiten ke Daerah Asal Studi Kasus Tenaga Kerja Magang asal Kabupaten Jembrana Di Jepang. Dalam *Jurnal Piramida Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 7(1) :h : 33-41.
- Azmy, Ana Sabhana. 2011. Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010. *Thesis*. Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Indonesia.
- Dianningtyas, Meditiari Wikan. 2011. *Penerapan Kebijakan Pembatasan Jumlah TKI Informal terhadap Remittancedan Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia : Pendekatan FSAM*. Departemen Ilmu Politik. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Elfindri & Rimilton Riduan, 2008, Tahapan Pembentukan Kelompok dan Pendamping: Sebuah Rekonstruksi, *Jurnal Ipteks Terapan Vol.2 No.2*, Koperatis Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi & Kepri.
- Fatimah, Alisa. 2014. Sejarah Penempatan TKI dan Tantangan yang Dihadapi. *Tinjauan Ekonomi & Keuangan: Mendorong Pemberdayaan TKI Vol. 4 No.3*, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.
- Febriani.2011. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan TKI Menuju Kesetaraan Upah di Luar Negeri: Sebuah Rekonstruksi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2, Nomor 1, Januari 2011 ISSN : 2086 – 5031*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa.
- Hasibuan, Desi Auliani. 2011. *Kebijakan Politik Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2004-2009 (Studi Analisis Mengenai TKI yang Bekerja di Malaysia)*. Medan: Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Krugman, Paul R., dan Maurice Obstfield. 2003. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan, Edisi kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mafrurah, Izza dkk. 2012. The Welfare of the Indonesian Migrant Workers (TKI) in the Land of a Malay Nation: A Socio-Economic Analysis. *Southern Asia Journal of Social and Political Issues, Vol. 1 No. 2, March 2012*. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- Rosyidah, Trie Anis. 2013. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Suryanata, I.G.Arya Yoga. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh Terhadap besarnya Pengiriman remitan oleh Migran Non Permanen Ke daerah Asal (Studi Kasus Di Desa Padang Sambian Kaja). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiharyanto. 2007. *Geografi dan Sosiologi*. Yogyakarta: Yudhistira.